

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 275 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 10 TAHUN 2005
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 10 TAHUN 2001
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-260/MK.7/2009
tanggal 10 Agustus 2009 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan
Republik Indonesia atas Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi nomor 10 Tahun
2001 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
dengan alasan :

1. Retribusi izin dikenakan sekali untuk setiap penerbitan izin.
2. Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet bersifat
administratif sehingga tarif retribusi ditetapkan secara lumpsum per
izin bukan berdasarkan volume usaha (per m2).

KEDUA : Agar Walikota Jambi menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Jambi Nomor 10 tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Jambi nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan
Pengusahaan Sarang Burung Walet paling lambat 7 (tujuh) hari sejak
ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11-12-2009

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

GAMAWAN FAUZI

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
 5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
 6. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
 7. Gubernur Jambi;
- Ketua DPRD Kota Jambi.